

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1. TINJAUAN PUSTAKA

2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian antar barang dan jasa meningkat sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Menurut penelitian Dinda dan Amri (2018:12) pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu Negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Sedangkan dalam penelitian Dedi Priyono dan I G.A.P. Wirathi (2016:1415) pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian yang menghasilkan pendapatan masyarakat pada periode tertentu (Mankiw, 2003). Pada dasarnya aktivitas perekonomian merupakan proses penggunaan suatu faktor produksi sehingga menghasilkan suatu output, dengan begitu proses ini dapat menghasilkan imbalan terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat.

Ada salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi ialah:

1. Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk domestik bruto (PDB) merupakan salah satu yang diciptakan oleh penduduk suatu Negara, yang artinya output atau produk nasional yang di produksi atau di hasilkan dalam suatu negara (produksi yang dihasilkan oleh negara asing ditambah oleh produksi yang dihasilkan warga domestik).

2. Produk Nasional Bruto (PNB)

Produk Nasional Bruto (PNB) merupakan salah satu yang diciptakan oleh negara, dimana faktor suatu produksi dalam negeri ditambah dengan faktor produksi luar negeri di Indonesia dikurangi dengan faktor produksi luar negeri di Indonesia.

3. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Bruto (PDB) digunakan sebagai penentuan tingkat kemakmuran masyarakat serta perkembangannya, selain itu sebagai nilai prestasi suatu pertumbuhan ekonomi. Untuk mengukur suatu pertumbuhan ekonomi harus dihitung terlebih dahulu pendapatan nasional riil yaitu PNB/PDB sesuai dengan harga yang berlaku dalam tahun dasar.

4. Tingkat Pertambahan Kemakmuran

Untuk menentukan tingkat dan pertumbuhan kemakmuran penduduk maka perlu dihitung pendapatan perkapitanya. Standar kehidupan masyarakat sangat berhubungan erat dengan tingkat kemakmuran masyarakat.

Standar kehidupan (*standard of life*) merupakan suatu pencapaian kesejahteraan yang diukur oleh pendapatan yang dihasilkan oleh masyarakat. Salah satu indikatornya adalah pengeluaran total suatu masyarakat, pengeluaran konsumsi yang meliputi pengeluaran total suatu keluarga, dan pengeluaran total suatu negara.

2.1.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori dibangun berdasarkan pengalaman empiris, sehingga teori dapat dijadikan sebagai dasar untuk memprediksi dan membuat suatu kebijakan. Terdapat

beberapa teori yang mengungkapkan tentang konsep pertumbuhan ekonomi, secara umum teori tersebut sebagai berikut:

2.1.1.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi Historis

Teori ini dikemukakan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

1. Warnert Sombart (1863-1947)

Menurut Warnert Sombart pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dapat dibagi menjadi tiga tingkatan:

A. Masa perekonomian tertutup

Pada masa ini semua kegiatan manusia hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Individu atau masyarakat bertindak sebagai produsen sekaligus konsumen sehingga tidak terjadi pertukaran barang atau jasa. Masa perekonomian ini memiliki ciri-ciri:

- a) Kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
- b) Setiap individu sebagai produsen sekaligus sebagai konsumen.
- c) Belum ada pertukaran barang atau jasa.

B. Masa kerajinan dan pertukangan.

Pada masa ini, kebutuhan manusia semakin meningkat, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif akibat perkembangan peradaban. Peningkatan kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi sendiri sehingga diperlukan pembagian kerja yang sesuai dengan keahlian masing-masing. Pembagian kerja ini menimbulkan pertukaran barang dan jasa. Pertukaran barang dan jasa pada masa ini belum disasari oleh tujuan untuk mencari keuntungan, namun semata-mata

untuk saling memenuhi kebutuhan. Masa kerajinan dan pertukangan memiliki beberapa ciri sebagai berikut:

- a) Meningkatnya kebutuhan manusia.
- b) Adanya pembagian tugas sesuai dengan keahlian.
- c) Timbulnya pertukaran barang dan jasa.
- d) Pertukaran belum didasari motif profit.

C. Masa kapitalis

Pada masa ini muncul kaum pemilik modal (kapitalis). Dalam menjalankan usahanya kaum kapitalis memerlukan para pekerja (kaum buruh). Produksi yang dilakukan oleh kaum kapitalis tidak lagi hanya sekedar memenuhi kebutuhannya, tetapi sudah bertujuan mencari laba. Warnert Sombart membagi masa kapitalis menjadi empat masa sebagai berikut:

1) Tingkat prakapitalis.

Masa ini memiliki beberapa ciri, yaitu:

- a) Kehidupan masyarakat masih statis.
- b) Bersifat kekeluargaan.
- c) Bekerja untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
- d) Hidup secara berkelompok.

2) Tingkat kapitalis.

Masa ini memiliki beberapa ciri, yaitu:

- a) Kehidupan masyarakat sudah dinamis.
- b) Bersifat individual.
- c) Adanya pembagian kerja.

d) Terjadi pertukaran untuk mencari keuntungan.

3) Tingkat kapitalisme raya.

Masa ini memiliki beberapa ciri, yaitu:

- a) Usahnaya semata-mata untuk mencari keuntungan.
- b) Munculnya kaum kapitalis yang memiliki alat produksi.
- c) Produksi dilakukan secara masal dengan alat modern.
- d) Perdagangan mengarah kepada persaingan monopoli.
- e) Dalam masyarakat terdapat dua kelompok yaitu majikan dan butuh.

4) Tingkat kapitalisme akhir.

Masa ini memiliki ciri, yaitu:

- a) Munculnya aliran sosialisme.
- b) Adanya campur tangan pemerintah dalam ekonomi.
- c) Mengutamakan kepentingan bersama.

2. Friedrich List (1789-1846)

Menurut Friedrich List, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dapat dibagi menjadi empat tahap, yaitu:

- a) Masa berburu dan pengembaraan.
- b) Masa berternak dan bertani.
- c) Masa bertani dan kerajinan.
- d) Masa kerajinan, industri, perdagangan.

3. Karl Butcher (1847-1930)

Menurut Karl Butcher, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dapat dibedakan menjadi empat tingkatan, yaitu:

- a) Masa rumah tangga tertutup.
- b) Rumah tangga kota.
- c) Rumah tangga bangsa.
- d) Rumah tangga dunia.

4. Walt Whitman Rostow (1916-1979)

W.W.Rostow mengungkapkan teori pertumbuhan ekonomi dalam bukunya yang berjudul *The Stage Of Economic Growth* menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi lima, yaitu:

1) Masyarakat tradisional (*The Traditional Society*)

Dalam hal ini diantaranya:

- a) Merupakan masyarakat yang mempunyai struktur perkembangan dalam fungsi-fungsi produksi yang terbatas.
- b) Belum adanya ilmu pengetahuan teknologi modern.
- c) Terdapat suatu batas tingkat output perkapita yang dapat dicapai.

2) Masyarakat pra kondisi untuk periode lepas landas (*The Preconditions for take off*)

Dalam hal ini diantaranya:

- a) Merupakan tingkat pertumbuhan ekonomi dimana masyarakat sedang berada dalam proses transisi.
- b) Sudah mulai penerapan ilmu pengetahuan modern dalam fungsi-fungsi produksi baru, baik di bidang pertanian maupun di bidang industri.

3) Periode lepas landas (*The Take off*)

Dalam hal ini diantaranya, yaitu:

- a) Merupakan interval waktu yang diperlakukan untuk mendobrak penghalang-penghalang pada pertumbuhan yang berkelanjutan.
- b) Kekuatan-kekuatan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi diperluas.
- c) Tingkat investasi yang efektif dan tingkat produksi dapat meningkat.
- d) Investasi efektif serta tabungan yang bersifat produktif meningkat atau lebih dari jumlah pendapatan nasional.
- e) Industri-industri baru berkembang dengan cepat dan industri yang sudah ada mengalami ekspansi dengan cepat.

4) Gerak menuju kedewasaan (*Maturity*)

Dalam hal ini diantaranya, yaitu:

- a) Merupakan perkembangan terus menerus dimana perekonomian tumbuh secara teratur serta lapangan usaha bertambah luas dengan penerapan teknologi modern.
- b) Investasi efektif serta tabungan meningkat dari 10% hingga 20% dari pendapatan nasional dan investasi ini berlangsung secara cepat.
- c) Output dapat melampaui pertambahan jumlah penduduk.
- d) Barang-barang yang dulunya diimpor, kini sudah dapat dihasilkan sendiri.
- e) Tingkat perekonomian menunjukkan kapasitas bergerak melampaui kekuatan industri pada masa *Take off* dengan penerapan teknologi modern.

5) Tingkat konsumsi tinggi (*High Mass Consumption*)

Dalam hal ini diantaranya, yaitu:

- a) Sektor-sektor industri merupakan sector yang memimpin bergerak kearah produksi barang-barang konsumsi tahan lama dan jasa-jasa.
- b) Pendapatan rill perkapita selalu meningkat sehingga sebagian besar masyarakat mencapai tingkat konsumsi yang melampaui kebutuhan bahan dasar, sandang dan pangan.
- c) Kesempatan kerja penuh sehingga pendapatan nasional tinggi.
- d) Pendapatan nasional yang tinggi dapat memenuhi tingkat konsumsi tinggi.

2.1.1.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik Dan Neo Klasik

1. Teori Klasik

Adam Smith, Teori Adam Smith beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi sebenarnya bertumpu pada adanya pertumbuhan penduduk. Dengan adanya pertumbuhan penduduk maka akan terdapat penambahan output atau hasil. Teori Adam Smith ini tertuang dalam bukunya yang berjudul *An Inquiry Into The Nature And Causes Of The Wealth Of Nations*.

David Ricardo, Ricardo berpendapat bahwa faktor pertumbuhan penduduk yang semakin besar sampai menjadi dua kali lipat pada suatu saat akan menyebabkan jumlah tenaga kerja melimpah. Kelebihan tenaga kerja akan mengakibatkan upah menjadi turun. Upah tersebut hanya dapat digunakan untuk membiayai taraf hidup minimum sehingga perekonomian akan mengalami

kemandegan. Teori David Ricardo ini dituangkan dalam bukunya yang berjudul *The Principles Of Political And Taxation*.

2. Teori Neoklasik

Robert Solow, Robert berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi modern dan hasil output. Adapun pertumbuhan penduduk dapat berdampak positif dan berdampak negatif. Oleh karenanya, menurut Robert Solow pertumbuhan penduduk harus dimanfaatkan sebagai sumber daya yang positif.

Harrod Domar, teori ini beranggapan bahwa modal harus dipakai secara efektif, karena pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh peranan pembentukan modal tersebut.

2.1.1.

2. Faktor-Faktor Pertumbuhan Ekonomi

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu:

- a) Faktor Sumber Daya Manusia.
- b) Faktor Sumber Daya Alam.
- c) Faktor Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.
- d) Faktor Budaya.
- e) Sumber Daya Modal.

2.1.1.3 Metode Perhitungan Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu menjadi tolak ukur untuk keberhasilan pembangunan suatu negara, terutama dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif

(*quantitative change*) dan biasanya diukur menggunakan data PDB (Produk Domestik Bruto) atau pendapatan dan bisa juga nilai akhir pasar (*total market value*) dari suatu barang akhir atau jasa yang dihasilkan dari perekonomian selama kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun).

Konsep perhitungan pertumbuhan ekonomi dalam satu periode (Zaini Ibrahim, 2013:92) yaitu:

$$GT = \left(\frac{PDBRt - PDBRt-1}{PDBRt} \right) \times 100\%$$

Keterangan :

GT : Pertumbuhan Ekonomi Periode t (Triwulan atau Tahunan)

PDBRt : Produk Domestik Bruto Riil periode t (Berdasarkan Harga Konstan)

PDBRt-1 : PDBR satu periode sebelumnya.

2.1.2 Nilai Tukar

Nilai tukar merupakan kurs harga mata uang domestik terhadap mata uang asing atau juga bisa disebut sebagai satu unit uang asing dalam mata uang domestik. Untuk contoh nilai tukar Rupiah terhadap Dollar yaitu harga satu Dollar US dalam Rupiah, misalnya 1\$=14.191,20 Rupiah.

Dalam nilai tukar terdapat nilai riil. Nilai riil merupakan harga-harga di dalam negeri berbanding dengan harga luar negeri yang dikoreksi dengan harga relatif. Untuk melakukan transaksi perdagangan internasional, negara tidak melakukan transaksinya hanya satu negara tetapi dengan beberapa negara. Dalam hal ini pengukuran nilai riil negara terhadap mitra dagang harus memperhitungkan juga laju inflasinya dan nilai tukar dari masing-masing negaranya.

2.1.2.1 Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Tukar

Menurut Iskandar dan Suseno (2004:6). Mata uang asing ditetapkan secara tetap mata uang lokal, hal ini merupakan suatu sistem mata uang tetap. Suatu penawaran atau permintaan akan mata uang tersebut akan mempengaruhi nilai tukar mata uang yang bersangkutan. Dengan begitu valuta mata uang asing relatif meningkat terhadap mata uang domestik, maka begitu sebaliknya mata uang domestik akan menurun. Sementara nilai mata uang domestik meningkat diakibatkan jika penawaran valuta asing relatif meningkat terhadap mata uang domestik.

Ada tiga faktor yang mempengaruhi permintaan valuta asing:

1. Faktor aliran modal keluar (*capital outflow*). Dimana semakin besar permintaan valuta asing maka akan semakin besar juga aliran modal keluar, dengan begitu pada lanjutannya nilai tukar akan melemah.
2. Faktor pembayaran impor. Dimana dengan tingginya impor suatu barang dan jasa, maka akan semakin besar juga permintaan valuta asing dengan begitu nilai tukar akan cenderung melemah. Dan jika sebaliknya apabila suatu impor menurun, maka permintaan valuta asing akan menurun juga sehingga akan menguatkan nilai tukar.
3. Kegiatan spekulasi. Dengan adanya kegiatan spekulasi valuta asing yang dilakukan maka semakin besar juga suatu permintaan terhadap valuta asing sehingga dengan begitu nilai tukar mata uang lokal terhadap mata uang asing akan melemah.

Terdapat juga dua faktor yang mempengaruhi valuta asing diantaranya:

1. Faktor aliran modal masuk (*capital inflow*). Nilai tukar yang cenderung semakin menguat diakibatkan dari semakin besarnya aliran modal yang masuk. Aliran modal yang masuk tersebut dapat berupa penempatan dana jangka pendek yang dilakukan oleh pihak asing (*portfolio investment*), pinjaman hutang luar negeri, dan juga investasi langsung oleh pihak asing (*foreign direct investment*).
2. Faktor penerimaan hasil ekspor. Jumlah valuta asing yang dimiliki suatu negara semakin menguat dan selanjutnya nilai tukar terhadap mata uang asing cenderung menguat semua maka semua itu di akibatkan oleh semakin besarnya volume penerimaan barang dan jasa. Begitupun sebaliknya jika jumlah valuta asing yang dimiliki suatu negara menurun sehingga nilai tukar cenderung mengalami depresiasi merupakan akibat dari ekspor yang menurun.

Dalam uraian di atas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar, permintaan dan penawaran suatu valuta asing dipengaruhi oleh perkembangan ekspor dan impor yang begitu berhubungan erat, atau bisa juga disebut dengan modal dari luar negeri dan dalam negeri.

2.1.2.2. Sistem Nilai Tukar

Secara garis besar sejak tahun 1970 di Indonesia telah menetapkan tiga sistem nilai tukar (Goeltom & Zulverdi, 1998:75-77) :

1. Sistem nilai tukar mengambang bebas (*Floating exchange rate system*).

Dalam hal ini kekuatan permintaan dan penawaran di valuta asing menentukan nilai tukar. Dengan begitu kekuatan pasar yang ada dibiarkan bergerak bebas oleh nilai tukar. Di Indonesia pada bulan Agustus 1997 sistem nilai tukar mengambang bebas, hal ini terjadi karena sistem nilai tukar yang mengambang

terkendali dan diterapkan sebelumnya belum mampu membendung adanya fluktuasi nilai tukar yang terjadi di pasar dan akhirnya menembus batas-batas yang telah ditetapkan.

2. Sistem nilai tukar mengambang terkendali (*Manage floating exchange rate system*).

Dalam hal ini kekuatan pasar menentukan nilai tukar dalam batas-batas tertentu, namun jika suatu pergerakan dalam pasar valuta asing menyebabkan tembusnya nilai tukar terhadap batas maka bank sentral akan melakukan investasi dengan cara melakukan pembelian di pasar atau melakukan penjualan sehingga menggiring nilai tukar kembali pada kisaran yang telah ditetapkan oleh bank sentral sebelumnya. Indonesia pernah menerapkan sistem nilai tukar ini pada periode 1978-Juli 1997. Dalam periode ini sistem nilai tukar yang digunakan sama namun pada unsur pengendalian nilai tukar semakin berkurang sedangkan semakin besar unsur mengembangnya.

3. Nilai tukar tetap (*Fixed exchange rate system*).

Pemerintah atau bank sentral menentukan berlakunya di suatu negara nilai tukar mata uang asing. Pada periode 1970-1978 sistem ini dilakukan di Indonesia. Dalam periode ini nilai tukar rupiah pernah ditetapkan sebesar Rp.250; - per USD sedangkan nilai tukar rupiah terhadap USD di bursa valuta asing dan pasar Internasional didasarkan sesuai nilai tukar terhadap mata uang negara lain yang berhutang.

2.1.2.3. Jenis-Jenis Nilai Tukar

Jenis nilai tukar mata uang terdiri dari empat jenis menurut Sadono Sukirno (2011:411) diantaranya adalah:

1. Kurs Tengah (*Middle Rate*).

Kurs ini merupakan kurs yang berada di posisi tengah antara beli dan kurs jual valuta asing terhadap mata uang nasional, dan ini telah ditetapkan oleh bank sentral saat pada waktu tertentu.

2. Kurs Jual (*Selling Rate*).

Kurs ini merupakan penjualan valuta asing tertentu yang telah ditentukan oleh suatu bank.

3. Kurs Beli (*Buying Rate*).

Kurs ini merupakan kurs pembelian valuta asing tertentu yang telah ditentukan oleh bank tertentu.

4. Kurs Rata (*Flat Rate*).

Kurs ini merupakan kurs transaksi jual beli *notes* dan *traveler cheque* yang berlaku dan dilakukan oleh bank.

2.1.3. Inflasi

Inflasi diartikan sebagai kenaikan harga secara terus menerus atau juga kenaikan uang beredar dalam suatu perekonomian. Dari pengertian tersebut dapat memicu gejala umum dari kenaikan jumlah uang yang beredar yang telah diduga mengakibatkan terjadinya suatu harga menjadi naik. Dalam inflasi harus terkandung unsur kenaikan harga, dimana kenaikan harga tersebut terjadi secara

umum atau menyeluruh. Hanya kenaikan harga yang terjadi secara umum yang dapat disebut sebagai inflasi (Suseno, 2009:3).

Menurut Suseno dan Siti Aisyah (2009) Laju inflasi dapat dihitung sesuai dengan keperluan analisis yang berbeda-beda. Untuk memenuhi keperluan yang berbeda tersebut, maka terdapat beberapa jenis laju inflasi dan angka, diantaranya:

1. Deflator Produk Domestik Bruto (Deflator PDB).

Inflasi disini dipergunakan untuk menghitung suatu perubahan harga dalam perekonomian secara keseluruhan. Angka deflator tersebut dihitung dengan cara membandingkan PDB nominal pada satu tahun tertentu dengan PDB pada tahun tertentu yang ditetapkan sebagai tahun dasar. Pada tahun dasar tersebut angka indeksnya ditetapkan sebesar 100%.

2. Indeks Harga Konsumen (IHK).

Laju inflasi ini menghitung perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi atau dipergunakan oleh masyarakat. Laju inflasi ini dihitung berdasarkan angka indeks yang disusun sesuai dengan harga barang dan jasa yang dikonsumsi atau dipergunakan oleh masyarakat. Sesuai dengan kondisi sosial ekonomi konsumen atau masyarakat yang bersangkutan maka jumlah barang dan jasa yang dipergunakan atau dikonsumsi dalam perhitungan angka indeks tersebut dari suatu negara dan negara yang lain selain itu dari waktu ke waktu dalam satu negara tertentu.

3. Indeks Biaya Produsen

Untuk ini berbeda dengan laju inflasi yang dihitung berdasarkan IHK, indeks biaya produsen ini dapat dihitung menggunakan harga yang diterima oleh produsen.

Indeks ini biasa dikatakan berbeda dengan IHK karena adanya perbedaan antara harga yang diterima oleh produsen dengan harga yang diterima oleh konsumen. Perbedaan ini dapat ditimbulkan karena adanya unsur subsidi, pajak, ataupun laba.

2.1.3.1 Teori Inflasi

Menurut suseno dan Siti Aisyah (2009:7-11) secara garis besar ada tiga kelompok teori mengenai inflasi yaitu:

1. Teori Keynes

Pendekatan Keynes menyatakan bahwa tetap tidak benar yang menyatakan teori kuantitas yang mengasumsikan elastisitas dan perputaran uang (*velocity of circulation*). Karena menurutnya elastisitas dan perputaran uang sangat sulit diprediksi dan banyak dipengaruhi oleh ekspektasi masyarakat serta perubahan barang-barang yang merupakan substitusi uang (*financial assets*). Hal tersebut terbukti bahwa suatu perekonomian yang menunjukkan sektor keuangannya yang telah maju dan terdapat suatu instrument-instrumen keuangan sehingga berfungsi sebagai substitusi uang, maka perputaran uang tersebut akan menjadi sulit diprediksinya. Adapun pengertian inflasi secara umum dikatakan inflasi timbul karena adanya jumlah uang yang beredar dalam suatu perekonomian melebihi jumlah uang yang diminta dalam suatu perekonomian yang bersangkutan. Dari pengertian tersebut tidak mengatakan bahwa tidak adanya faktor-faktor lain yang dapat menimbulkan inflasi. Ada banyak faktor lain yang dapat mengakibatkan timbulnya inflasi, akan tetapi inflasi disebabkan oleh jumlah uang yang beredar atau likuiditas yang berlebih sehingga memicu timbulnya inflasi yang utama.

2. Teori strukturalis

Teori ini menyatakan bahwa inflasi, terutama yang ada di negara berkembang lebih disebabkan oleh faktor-faktor struktural dalam perekonomiannya. Terdapat dua masalah struktural dalam perekonomian di negara berkembang yang dapat mengakibatkan inflasi diantaranya, (1) penerimaan ekspor yang tidak elastis, artinya pertumbuhan nilai ekspor ini lambat dibandingkan dengan pertumbuhan sektor lainnya. Hal tersebut dapat disebabkan oleh *terms of trade* yang memburuk dan produksi suatu barang ekspor kurang responsif terhadap kenaikan harga. Dengan melambatnya pertumbuhan sektor ini, sehingga akan terhambat kemampuan untuk mengimpor suatu barang yang dibutuhkan. (2) produksi bahan makanan dalam negeri yang tidak elastis merupakan masalah struktural perekonomian di negara berkembang, dengan begitu pertumbuhan produksi makanan dalam negeri ini tidak secepat pertumbuhan penduduk dan pendapatan perkapita dan mengakibatkan harga makanan dalam negeri mengalami kenaikan harga yang lebih tinggi daripada kenaikan harga barang-barang lainnya. Hal ini akan mendorong timbulnya tuntutan kenaikan upah dari pekerja sektor industri yang selanjutnya akan meningkatkan biaya produksi juga dan pada akhirnya akan menimbulkan inflasi.

3. Teori kuantitas

Teori ini menerangkan bahwa pada dasarnya suatu hipotesis tentang faktor yang dapat menyebabkan perubahan tingkat harga ketika adanya kenaikan jumlah uang yang beredar merupakan suatu faktor penentu atau dapat juga disebut sebagai faktor yang mempengaruhi kenaikan tingkat harga. Teori yang terkait tentang

kuantitas uang yaitu (1) proposionalitas tingkat harga dengan jumlah uang, (2) netralitas uang, (3) teori moneter tentang tingkat harga, dan (4) mekanisme transmisi moneter.

Dengan begitu dalam proses inflasi dan prakteknya kemungkinan dapat mengandung aspek-aspek dari ketiga teori tersebut.

2.1.3.2 Jenis-jenis Inflasi.

Berdasarkan sebab, akibatnya, dan asalnya inflasi dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Inflasi berdasarkan sifatnya

Ada empat kategori diantaranya:

a. Inflasi sangat tinggi (*Hyperinflation*).

Inflasi ini ditandai dengan adanya kenaikan harga secara drastis sehingga mencapai diatas 100%. Pada saat kondisi seperti ini, masyarakat tidak ingin menyimpan uang karena mereka tahu nilainya akan turun sangat tajam sehingga lebih baik ditukarkan dengan barang.

b. Inflasi Berat (*High Inflation*)

Inflasi ini ditandai dengan kenaikan yang besarnya mencapai antara 30%-100% per tahun.

c. Inflasi Menengah (*Galloping Inflation*)

Inflasi ini ditandai dengan kenaikan besarnya mencapai antara 10%-30% per tahun. Inflasi ini biasanya ditandai dengan naiknya harga secara cepat dan relatif besar.

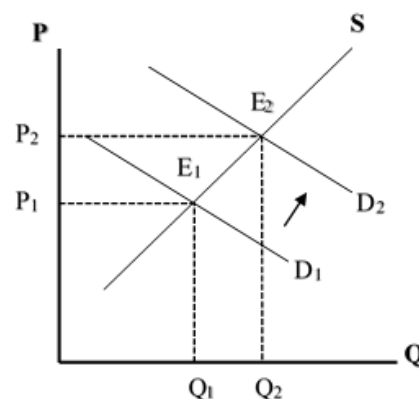
d. Inflasi Rendah (*Creeping Inflation*)

Inflasi ini ditandai dengan besarnya mencapai 10% per tahun. Inflasi ini dibutuhkan dalam ekonomi karena bisa mendorong produsen untuk memproduksi barang dan jasa.

2. Inflasi berdasarkan sebabnya

Ada tiga kategori diantaranya;

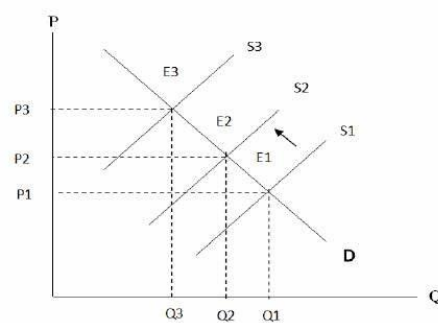
- a. *Demand Pull Inflation*, pengaruh permintaan yang tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah penawaran produksi akan mengakibatkan inflasi. Sehingga dengan begitu mengakibatkan permintaan banyak sementara penawaran tetap maka harga akan naik sesuai dengan hukum permintaan. Apabila hal ini terjadi secara terus menerus maka akan mengakibatkan inflasi yang berkepanjangan. Oleh sebab itu, untuk mengatasinya diperlukan adanya penambahan kinerja baru dengan pembukaan kapasitas baru.



Sumber: Researchgate.net

Gambar 2.1 Kurva Demand Pull Inflation

- b. *Cost push inflation*, kenaikan biaya input atau biaya faktor produksi yang disebabkan karena naiknya biaya produksi sehingga menyebabkan inflasi. Akibat adanya kenaikan faktor produksi, terdapat dua hal yang dapat dilakukan oleh produsen, diantaranya yaitu menaikkan harga produk dengan jumlah penawaran yang sama atau bisa juga harga produknya naik karena jumlah produksi.



Sumber: Researchgate.net

Gambar 2.1 Kurva *Cost Push Inflation*

- c. *Battle Neck Inflation*, inflasi ini disebabkan karena adanya faktor penawaran dan permintaan. Jika karena adanya faktor penawaran maka persoalannya masih banyak yang dapat menimbulkan inflasi. Selain itu inflasi karena faktor permintaan disebabkan karena adanya likuiditas yang lebih banyak, baik berasal dari sisi keuangan ataupun akibat tingginya ekspektasi terhadap permintaan baru.

3. Inflasi Berdasarkan Asalnya

Terdapat dua kategori diantaranya yaitu:

- a. *Domestic Inflation* (Inflasi yang berasal dari dalam negeri), terjadinya defisit dalam pembiayaan dan belanja negara yang terlihat pada anggaran belanja negara ini mengakibatkan timbulnya inflasi ini. Cara mengatasinya

yaitu dengan cara pemerintah harus melakukan kebijakan mencetak uang baru, dengan begitu tidak menutup kemungkinan bisa terhindar dari inflasi ini.

- b. Imported Inflation* (Inflasi yang berasal dari luar negeri), inflasi ini timbul karena adanya negara-negara yang menjadi mitra dagang suatu negara mengalami inflasi yang tinggi mengenai kenaikan harga-harga di luar negeri atau juga di negara mitra dagang utama (disebabkan oleh melemahnya nilai tukar) yang secara langsung maupun tidak langsung yang akan menimbulkan kenaikan biaya produksi, hal ini biasanya disertai dengan naiknya harga-harga suatu barang.

2.1.3.3. Dampak Adanya Inflasi

Adapun dampak yang ditimbulkan karena adanya inflasi antara lain:

Inflasi ini akan mendorong adanya redistribusi pendapatan antar anggota masyarakat. Dengan begitu munculah efek redistribusi dan inflasi, yang akan mempengaruhi kesejahteraan ekonomi anggota masyarakat yaitu inflasi, sebab redistribusi pendapatan jika satu orang pendapatan riil nya meningkat maka pendapatan riil yang lainnya akan mengalami jatuh. Pada umumnya bagi para pegawai negeri akan mengalami dampak negatif saat inflasi terjadi, hal ini disebabkan karena inflasi yang tinggi akan mengakibatkan pendapatan riil mereka turun.

1. Daya beli mata uang akan menjadi rendah apabila nilai mata uang mengalami penurunan. Penurunan daya beli mata uang akan berdampak pada individu,

dunia usaha dan APBN. Dengan begitu, laju inflasi yang tinggi ini dapat berdampak buruk terhadap perekonomian secara keseluruhan.

2. Lingkungan yang tidak stabil bagi ekonomi juga diakibatkan karena inflasi. Ketika konsumen memperkirakan inflasi akan naik di masa akan datang, maka mereka akan melakukan pembelian barang secara besar-besaran dibandingkan dengan mereka harus menunggu barang tersebut harganya meningkat.
3. Perubahan-perubahan dalam output dan kesempatan kerja juga disebabkan oleh inflasi. Hal ini terjadi karena inflasi memotivasi perusahaan untuk memproduksi lebih atau kurang dari yang telah dilakukan inflasi dan juga dapat memotivasi perusahaan untuk memproduksi lebih atau kurang dari yang telah dilakukan.
4. Terjadinya ketidak seimbangan di pasar modal merupakan akibat dari inflasi yang cenderung memperoleh tingkat bunga riil. Dalam hal ini menyebabkan penawaran dana untuk investasi menurun dan mengakibatkan investor sektor swasta berkurang sampai tingkat keseimbangannya (Herlan Firmansyah dkk, 2010).

2.1.3.4. Metode Perhitungan Inflasi

Dalam masyarakat luas inflasi dikenal sebagai indeks harga konsumen (IHK). IHK ini dihitung sesuai dengan survey terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat, dengan begitu IHK akan menunjukkan angka perubahan suatu barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Untuk menghitung inflasi ini, di Indonesia dominan lebih banyak menggunakan indeks harga konsumen (IHK).

Rumus yang digunakan pada saat mencari inflasi sebagai berikut:

$$INF = \frac{IHKt - IHKt-1}{IHKt-1} \times 100\%$$

Keterangan;

INF : Inflasi

IHKt : Indeks Harga Konsumen tahun t

IHKt-1 : Indeks Harga Konsumen tahun sebelumnya.

2.1.4. Pinjaman Luar Negeri (Utang Luar Negeri)

Pinjaman luar negeri merupakan penerimaan suatu negara baik dalam bentuk devisa atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun berbentuk barang atau jasa yang didapat dari/pemberi pinjaman luar negeri dan harus dibayar kembali sesuai dengan kesepakatan atau persyaratan tertentu. Sedangkan hutang luar negeri itu sendiri merupakan surat berharga yang diterbitkan dalam negeri sehingga menimbulkan kewajiban membayar kembali kepada pihak luar negeri atau bukan penduduk.

2.1.4.1. Faktor yang melatar belakangi utang luar negeri.

Menurut Keynes, salah satu alasan utama pemerintah melakukan suatu pinjaman luar negeri yaitu karena tingginya defisit anggaran pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Dengan begitu pemerintah berusaha menutupi kekurangan tersebut. Semakin tingginya ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri maka ini menjadi masalah terbesar di masa yang akan mendatang. Hal tersebut karena utang harus dibayar dengan jangka waktu yang telah disepakati. Suatu kebijakan utang luar negeri untuk membiayai defisit anggaran belanja pemerintah tidak akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Ricardian oleh

Barro, 1989). Hal ini disebabkan karena efek pertambahan pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh hutang harus dibayarkan oleh pemerintah pada waktu yang akan datang dengan kenaikan pajak (Astanti, 2015).

2.1.4.2. Macam-Macam Hutang Luar Negeri Indonesia

Menurut Nely Ayu (2016:11) utang luar negeri di Indonesia terdiri dari tiga macam diantaranya yaitu:

a. Utang Luar Negeri Bank Swasta

Bank Indonesia memiliki hutang, hal ini digunakan untuk mendukung neraca pembayaran dan cadangan devisa. Selain itu yang menempatkan dananya pada sertifikat bank Indonesia merupakan hutang kepada pihak bukan penduduk.

b. Utang Luar Negeri Swasta

Merupakan utang luar negeri penduduk kepada bukan penduduk dalam bentuk valas atau rupiah Indonesia berdasarkan pada perjanjian hutang (*loan agreement*) atau perjanjian lainnya, kas dan simpanan milik bukan penduduk, dan kewajiban lainnya kepada bukan penduduk.

c. Hutang Negeri Pemerintah

Hutang yang dimiliki pemerintah disini berupa utang bilateral, leasing, komersial, multilateral, fasilitas kredit ekspor dan SBN (Surat Berharga Negara) baik yang diterbitkan di luar negeri maupun di dalam negeri yang bukan dimiliki oleh penduduk.

2.1.4.3. Indikator Beban Utang Luar Negeri

Menurut Nurul Huda (2016:236) ada tiga indikator, diantaranya yaitu;

1. DSR (*Debt Service Ratio*)

Rasio pembayaran hutang terhadap ekspor bersih yaitu perbandingan antara pembayaran bunga dan cicilan hutang terhadap penerimaan ekspor bersih.

$$DSR = \frac{B + Cu}{Xn} \times 100\%$$

Keterangan:

DSR = Debt service Ratio

B + Cu = Pembayaran Bunga dan Cicilan Hutang

Xn = Ekspor Bersih

<20% = Ambang Batas Aman

2. DER (*Debt Ekspor Ratio*)

Rasio total hutang terhadap ekspor bersih merupakan perbandingan antara utang luar negeri terhadap penerimaan ekspor bersih.

$$DER = \frac{TULN}{Xn} \times 100\%$$

Keterangan:

DER = Debt Ekspor Ratio

TULN = Total Utang Luar Negeri

Xn = Ekspor Bersih

<20% = Ambang Batas Aman

3. DGNP (*Debt to GNP Ratio*)

Rasio total hutang terhadap GNP merupakan perbandingan antara total utang luar negeri (kumulatif) terhadap produk nasional bruto.

$$DGNP = \frac{TULN}{Xn} \times 100\%$$

Keterangan:

DGNP = Debt to GNP Ratio

TULN = Total Utang Luar Negeri

Xn = Produk Nasional Bruto

<40% = Ambang Batas Aman

2.1.5. Pajak

Salah satu penerimaan pemerintah adalah pajak. Pajak merupakan suatu iuran yang wajib dibayarkan oleh masyarakat (wajib pajak) yang dipungut oleh pemerintah dengan tujuan untuk menutupi pengeluaran negara serta biaya pembangunan tanpa balas jasa yang ditunjuk secara langsung. Pajak adalah sumber daya yang utama dari suatu pendapatan publik dan menjadikannya kebijakan ekonomi yang ada selain itu ada juga yang bertumpu pada pendapatan pajak suatu negara dalam mengatur dan mengembangkan keunggulan sebuah negara dalam persaingan global.

2.1.5.1. Jenis Pajak

1) Pajak menurut golongan

a) Pajak Langsung (*Direct Tax*)

Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan secara berkala pada wajib pajak berdasarkan surat ketetapan pajak (SKP) yang dibuat oleh kantor pajak. Pada intinya, surat ketetapan pajak (SKP) memuat beberapa besar pajak yang harus dibayar wajib pajak. Pajak langsung harus dipikul sendiri oleh wajib pajak, sebab pajak ini tidak bisa dialihkan kepada pihak lain, berbeda dengan pajak yang tidak langsung yang bebannya bisa dialihkan kepada pihak lain. Contoh

pajak langsung yaitu seperti pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan (PBB).

b) Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*)

Pajak Tidak Langsung merupakan pajak yang dikenakan pada wajib pajak hanya jika wajib pajak ini melakukan perbuatan atau peristiwa tertentu. Maka dari itu, pajak tidak langsung ini tidak bisa dipungut secara berkala, pajak ini hanya bisa dipungut jika terjadi perbuatan atau peristiwa tertentu yang menimbulkan kewajiban membayar pajak. Contoh pajak tidak langsung yaitu, pajak penjualan atas barang mewah. Pajak ini bisa dikenakan, jika ada wajib pajak yang melakukan penjualan barang mewah.

2) Pajak Menurut Sifatnya

a) Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pemungutannya berdasar atas subjeknya (orangnya), dimana keadaan ini pajak dapat mempengaruhi jumlah yang harus dibayar. Contohnya seperti, pajak penghasilan dan pajak kekayaan.

b) Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah pajak yang pemungutannya berdasarkan atas objeknya. Contohnya seperti, pajak kekayaan, pajak impor, pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan, dan lainnya.

3) Pajak Menurut Pemungutannya

a) Pajak Negara (Pusat)

Pajak negara yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui aparatnya, yaitu Dirjen Pajak, Kantor Inspeksi Pajak yang tersebar diseluruh Indonesia, maupun Dirjen Bea dan Cukai. Contohnya seperti, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan bea materai.

b) Pajak Daerah (Lokal)

Pajak daerah (lokal) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan terbatas pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dilakukan oleh Pemda Tingkat I maupun oleh Pemda Tingkat II. Contohnya seperti, pajak radio, pajak televisi, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan sebagainya.

2.1.5.2. Jenis-jenis Pajak di Indonesia

Pajak yang berlaku di Indonesia saat ini adalah:

- 1) Pajak yang dipakai oleh pemerintah pusat
 - a) Pajak Penghasilan (PPh)
 - b) Pajak Penambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN)
 - c) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
 - d) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - e) Bea Materai
 - f) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
 - g) Cukai
 - h) Bea Masuk

- 2) Pajak yang dipajaki oleh Pemerintah Daerah Tingkat I
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan diatas air.
 - b) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
 - c) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Kendaraan Diatas Air.
 - d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

- 3) Pajak yang dipajaki oleh Pemerintah Daerah Tingkat II
 - a) Pajak Hotel,
 - b) Pajak Restoran,
 - c) Pajak Reklame,
 - d) Pajak Hiburan,
 - e) Pajak Penerangan jalan,
 - f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C,
 - g) Pajak Parkir,
 - h) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,
 - i) Pajak Kendaraan Bermotor.

2.1.5.3 Fungsi Pajak

1. Fungsi anggaran (*Budgetair*).

Pengeluaran-pengeluaran negara dibiayai oleh pajak, hal ini menjadikan sebagai salah satu pendapatan negara. Negara membutuhkan biaya dalam menjalankan tugas-tugas rutin negara dan pembangunan. Penerimaan pajak inilah yang menjadi sumber pembiayaan negara. Selain itu pajak juga

digunakan sebagai pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain-lain. Dalam pembiayaan pembangunan, uang yang dikeluarkan dari pemerintah yaitu penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Sektor pajak utamanya mengharapkan meningkatnya suatu pembangunan pembiayaan kebutuhan sesuai tahun ke tahun dari tabungan pemerintah.

2. Fungsi mengatur (*Regulerend*).

Pemerintah dapat mengatur suatu pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan begitu fungsi mengatur, pajak dapat dipergunakan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan.

3. Fungsi stabilitas.

Dengan adanya pajak, inflasi dapat dikendalikan dengan cara menjalankan suatu kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, yang dilakukan oleh pemerintah melalui dana yang tersedia.

4. Fungsi redistribusi pendapatan.

Pajak yang telah dipungut oleh negara akan dipergunakan sebagai membiayai semua kepentingan umum, termasuk pembiayaan pembangunan sehingga dapat membuka suatu lowongan pekerjaan, dengan begitu pendapatan masyarakat akan meningkat.

2.1.5.4. Syarat Pemungutan Pajak

Tidak mudah pembebanan pajak ini pada masyarakat. Jika pajak terlalu tinggi maka masyarakat enggan untuk membayar pajak, akan tetapi jika pajak terlalu

rendah maka pembangunan tidak akan berjalan karena dananya kurang. Dengan begitu pajak memiliki persyaratan khusus diantaranya yaitu:

1. Pemungutan pajak harus adil.

Hukum pajak pun memiliki tujuan yang sama yaitu menciptakan suatu keadilan dalam pemungutan pajak. Maksud adil disini yaitu adil dalam pelaksanaannya maupun adil dalam perundang-undangan, seperti: (1). Mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak, (2). Pajak diberlakukan bagi para masyarakat (wajib pajak) yang memenuhi syarat sebagai syarat wajib pajak. (3). Sanksi atas pelanggaran pajak berlaku secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.

2. Pemungutan pajak harus sesuai dengan undang-undang.

Sebagaimana di Indonesia telah ditetapkan undang-undang mengenai pemungutan pajak menurut Pasal 23A UUD 1945 berbunyi: *“pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”*. Dengan begitu terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun undang-undang tentang pajak, yaitu: (1). Pemungutan yang dilakukan oleh negara yang diatur oleh UUD harus dijamin kelancarannya. (2). Jaminan hukum untuk para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum. (3). Jaminan hukum ini akan terjaga kerahasiaannya bagi para wajib pajak.

3. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian.

Dalam hal ini pajak harus diusahakan sedemikian rupa untuk tidak mengganggu suatu perekonomian, baik dalam kegiatan produksi, perdagangan,

maupun jasa. Pajak ini jangan sampai mengganggu kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya pemasok pajak, terutama bagi masyarakat kecil dan menengah.

4. Pemungutan pajak harus efisien.

Dalam rangka pemungutan pajak biaya-biaya yang dikeluarkan harus diperhitungkan. Jangan sampai biaya pengurusan pajak lebih besar dari biaya yang diterima, dengan begitu sistem pemungutan pajak harus dilaksanakan secara sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Sehingga, wajib pajak ini tidak akan mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran pajak, baik dari segi perhitungan maupun waktu.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Pajak yang dipungut ini akan sangat menentukan keberhasilan dalam pemungutan pajak. Sistem pajak yang sederhana ini akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga dapat berpengaruh positif bagi para wajib pajak atas kesadaran untuk membayarnya.

2.1.5.5. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011:7) yaitu:

1. *Official Assessment System*

Official Assessment System merupakan salah satu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Terdapat beberapa ciri-ciri *Official Assessment System*:

- a. Fiskus mempunyai wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang.

- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Setelah dikeluarkannya ketetapan pajak oleh fiskus maka akan timbul utang pajak.

2. *Self Assessment System*

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan terhadap wajib pajak untuk menentukan besar pajak yang terutang.

Ciri-ciri *Self Assessment System*:

- a. Memberikan wewenang terhadap wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang.
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari melaporkan, menghitung, dan menyetor sendiri pajak terutang.
- c. Fiskus ini tidak ikut campur dalam pajak terutang hanya saja mengawasi.

3. *With Holding System*

With holding System merupakan pemungutan pajak yang memberikan wewenang terhadap pihak ketiga (bukan fiskus dan juga bukan wajib pajak yang memiliki sangkutan).

Adapun ciri-ciri *With Holding System*: Memiliki wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang kepada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak yang memiliki wewenang

2.2. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi *Laju Pertumbuhan Ekonomi* yaitu :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti dan Judul	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Abdul Malik dan Denny Kurnia (2017) Pengaruh Hutang Luar Negeri dan Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	-Pertumbuhan Ekonomi -Utang Luar Negeri	-Penanaman Modal	Hutang luar negeri dan penanaman modal asing berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.	Jurnal Akuntansi. Vol. 03, No. 02, Januari 2017.
Dewi Maharani Rangky dan Maya Macia Sari (2019). Analisis Utang Luar Negeri dan Inflasi Indonesia	-Utang Luar Negeri -Inflasi	-Nilai Tukar -Penerimaan Pemerintah	Lag 2 utang luar negeri mempengaruhi utang Indonesia dan inflasi mempengaruhi utang luar negeri. Lag 4, utang luar negeri mempengaruhi inflasi namun inflasi tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2000-2017.	Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Vol. 19, No. 01, 2019.
Imam Syafi'i, Fauzan Abdul Syukur, Muhammad Ghafur Wibowo	-Utang Luar Negeri. -Inflasi. -Pertumbuhan Ekonomi.	-GDP.	Inflasi dan GDP secara parsial berpengaruh negative dan signifikan	Jurnal Ilmu Ekonomi. Vol. 02, No. 01, Mei 2021.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(2021). Pengaruh Utang Luar Negeri, Inflasi, dan Pendapatan Negara Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi di 6 Negara Asean.			terhadap pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN, sedangkan utang luar negeri tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.	
Dinda Ainun Zuhra dan Amri (2018). Pengaruh Aliran Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.	-Pinjaman Luar Negeri. -Pertumbuhan Ekonomi	-Investasi Langsung Asing. -Ordinary Least Square (OLS)	Variabel pinjaman luar negeri berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi.	Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Ekonomi Pembangun an Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah. Vol. 03, No. 01, Februari 2018
Muhammad Faisal Amrillah (2016). Pengaruh Nilai Tukar Rupiah (kurs), Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Return Saham Pada	-Nilai Tukar. -Inflasi. -Pertumbuhan Ekonomi.	-Return Saham. -Path Analysis.	Variabel nilai tukar, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi secara langsung memiliki pengaruh terhadap return saham.	Jurnal Valuta. Vol. 02, No.02, Oktober 2016.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2008- 2014.				
Yusri Hazmi (2018). Analisis Kredit, GDP, Inflasi dan Suku Bunga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.	-Inflasi. -Pertumbuhan Ekonomi.	-Kredit. -PDB. -Suku Bunga.	Perkiraan VECM menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kredit, sedangkan inflasi dan suku bunga kredit berpengaruh negatif.	Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol. 20, No. 02, Agustus 2018.
Rahmah Yulianti dan Khairuna (2019). Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh Periode 2015- 2018 Dalam Perespektif Ekonomi Islam.	-Inflasi. -Pertumbuhan Ekonomi.	-Perspektif islam.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai koefisien determinasinya sebesar 29,4. Nilai koefisien determinasi yang telah dihitung sebesar 29,4% sehingga masuk dalam kriteria peranan	Jurnal Akuntansi Muhamma diah. Vol. 09, No. 02, Januari- Juni 2019.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			yang cukup tinggi.	
Hidayatullah Syamsuyar dan Ikhsan (2017). Dampak Sistem Nilai Tukar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.	-Nilai Tukar. -Pertumbuhan Ekonomi	-Sistem nilai tukar -OLS	Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.	Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah. Vol. 02, No. 03, Agustus 2017.
Estro Dariatno Sihalohe (2020). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Pendekatan Vector Autoregressive.	-Penerimaan Pajak. -Pertumbuhan Ekonomi.	-Vektor Autoregressive.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak penghasilan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pemerintah dan pertumbuhan ekonomi.	Forum Ekonomi. Vol. 02, No. 02, 2020.
Faishol Luthfi (2018). Utang Luar Negeri Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam.	-Utang Luar Negeri	-Perspektif Islam	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika utang luar negeri tidak dapat dikelola baik oleh pemerintah maka akan menjadi boomerang dan	Jurnal Ekonomi Syariah. Vol. 06, No. 02, 2018

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.	
Berlian Karlina (2017). Pengaruh Tingkat inflasi, IHK Terhadap PDB di Indonesia Pada Tahun 2011- 2015.	-Tingkat Inflasi	-Indeks Harga Konsumen -PDB	Perubahan PDB di Indonesia dari tahun 2011-2015 dipengaruhi oleh indeks harga dan tingkat inflasi dan tidak pada IHK.	Jurnal Ekonomika dan Manajemen . Vol. 6, No. 1, April 2017.
Rachmasari A, Ryval A, dan Tika W (2018). Pengaruh Penyalruan Dana ZIS dan Tingkat Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2011- 2015.	-Inflasi -Pertumbuhan Ekonomi	-Dana ZIS	Dana ZIS (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi dan inflasi, Dana ZIS (X2) tidak berpengaruh signifikan dan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi	Jurnal Ekonomi Syariah. Vol. 3, No. 2, Agustus 2018
Eny Widiaty dan Anton Priyo N (2020). Pertumbuhan Ekonomi	-Pertumbuhan Ekonomi -Inflasi -Utang Luar Negeri	-Pengeluaran Konsumsi Pemerintah -Pembiayaan Syariah	Inflasi, Utang luar negeri, dalam jangka panjang berpengaruh	Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Indonesia Perspektif Ekonomi Islam: Peran Inflasi, Pengeluaran Pemerintah, Utang Luar Negeri dan Pembiayaan Syariah.			negatif, jangka pendek positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembiayaan syariah dalam jangka pendek atau panjang berpengaruh baik	Vol. 6, No. 2, 2020.
Putu Kartika D, dan Nyoman Triaryati (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Suku Bunga dan Pajak Terhadap Investasi Asing langsung	-Pertumbuhan Ekonomi	-Suku Bunga Pajak -Investasi Asing Langsung	Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap suku bunga pajak dan investasi asing langsung.	E-Jurnal Manajemen Unud. Vol. 4, No. 4, 2015.
Mohammad Azis (2016). Pengaruh Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kab.Malinau	-Pertumbuhan Ekonomi	-Sumber Daya Alam -Dana Alokasi Umum -Pendapatan Asli Daerah	Dana bagi hasil bukan pajak/SDA, Dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah secara simultan berpengaruh signifikan, dan secara parsial hanya pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan Terhadap	Jurnal Ekonomi Keuangan, dan Manajemen . Vol. 12, No. 1, 2016.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			pertumbuhan ekonomi	

2.2. Kerangka Pemikiran.

Untuk mempermudah penulis dalam penelitian maka dimunculkan kerangka berfikir untuk menjelaskan Nilai Tukar, Inflasi, Pinjaman Luar Negeri, dan Penerimaan Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.

2.2.1. Hubungan Antara Nilai Tukar Dengan Pertumbuhan Ekonomi.

Nilai tukar sangat diperhatikan dalam perekonomian suatu negara, karena nilai tukar ini sangat berpengaruh besar dengan pertumbuhan ekonomi. Naik turunnya nilai tukar ini sangat berpengaruh terhadap lalu lintas perdagangan dunia. Jika nilai tukar ini mengalami depresiasi maka akan merugikan para importir karena barang-barang luar negeri menjadi mahal, akan tetapi sebaliknya bagi para eksportir akan sangat menguntungkan bagi negara tersebut karena hasil produksi barang-barang mereka akan lebih banyak diminati di pasar. Dampak dari negara-negara berkembang yang menganut rezim nilai tukar yang kurang fleksibel yaitu berakibat pada pertumbuhan ekonomi yang lambat serta volatilitas output yang lebih besar. Sedangkan untuk negara-negara maju tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi baik menggunakan rezim nilai tukar *fixed* maupun rezim nilai tukar *floating* (Yeyati, 2003). Sedangkan hasil penelitian menurut (Ghosh 2002 dalam Suselo 2008) menunjukkan penelitian ini berbeda bahwa negara yang menerapkan rezim nilai tukar *fixed* dan *intermediate* menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibanding dengan negara-negara yang menggunakan rezim nilai tukar *floating*.

2.2.2. Hubungan Antara Inflasi Dengan Pertumbuhan Ekonomi.

Inflasi merupakan naiknya harga suatu barang atau jasa secara menyeluruh dan terus menerus. Dengan adanya inflasi ini berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menurut Imam Syafi'i (2021) yang menunjukkan bahwa inflasi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa jika inflasi naik maka pertumbuhan ekonomi akan menurun begitupun sebaliknya. Inflasi tersebut dapat diakibatkan oleh beberapa faktor terutama naiknya harga secara terus menerus. Dengan naiknya harga tersebut maka gaya hidup seseorang pun akan naik. Menurut penelitian serupa yaitu Mokhova & Zinecker (2014) yang menyatakan bahwa inflasi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi menurut penelitian Kalsum (2017) menyatakan bahwa variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.2.3. Hubungan Antara Pinjaman Luar Negeri (Utang Luar Negeri) Dengan Pertumbuhan Ekonomi.

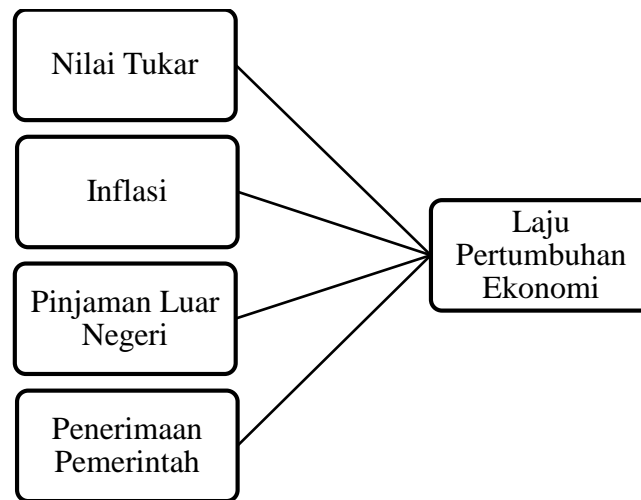
Utang luar negeri ini timbul karena pengelolaan ekonomi yang kurang stabil atau tidak seimbang. Dengan adanya utang luar negeri ini maka dapat menutup biaya pembangunan dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Meskipun utang luar negeri ini dapat membantu pengelolaan ekonomi akan tetapi beban pembayaran cicilan dan bunga yang terus menerus dilaksanakan dan dibayar pada waktu tertentu. Hasil penelitian menurut Abdul Malik (2017) menyatakan bahwa utang luar negeri berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan menurut penelitian yang sama Nurlia Listiani, menjelaskan bahwa utang luar negeri

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai koefisien 4,589, yang artinya bahwa ketika terjadi kenaikan rasio utang luar negeri dari PDB sebesar 1% maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,589% dengan asumsi faktor lain.

2.2.4. Hubungan Antara Penerimaan Pemerintah (Pajak) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Pajak merupakan suatu komponen terbesar sebagai penerimaan negara dan memiliki kontribusi besar dalam pembiayaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Secara tidak langsung pajak ini telah membantu menjalankan roda pemerintahan. Setiap pemerintah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mendapatkan pendapatan pemerintah lewat pajak ini, sehingga dapat membiayai seluruh pengeluaran negara dengan begitu pemerintah tidak perlu meminjam dana dari pihak lainnya. Hasil penelitian Estro (2020) menyatakan bahwa pajak penghasilan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pemerintah serta pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam penelitian Estro (2020) mengemukakan bahwa tingkat pertumbuhan penerimaan pemerintah memiliki dampak positif terhadap peningkatan rasio pajak penghasilan terhadap total pendapatan pajak di Indonesia, selain itu rasio pajak pertambahan nilai terhadap total pendapatan pajak Indonesia, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu menurut Mashkoor (2010) menunjukkan bahwa pajak memiliki koefisien yang signifikan.

Untuk Menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi maka penulis menyusun kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.3. Kerangka Pemikiran

2.3. Hipotesis

Berdasarkan kerangka Pemikiran diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Diduga, secara parsial Nilai Tukar, Inflasi, Pinjaman Luar Negeri, dan Penerimaan pemerintah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
2. Diduga secara bersama-sama Nilai Tukar, Inflasi, Pinjaman Luar Negeri, dan Penerimaan Pemerintah berpengaruh terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi.